

**PERENCANAAN PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016**

Oleh:

Nasrul

Email: nasrul.robber@gmail.com

Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Educational planning as a process of preparing a set of alternative decisions for future activities that are directed towards achieving goals with optimal effort taking into account the facts that exist in the field of education as a whole. The program is a policy instrument that contains one or more activities carried out by government agencies / institutions to achieve goals and objectives and obtain budget allocations, or activities coordinated by government agencies. The purpose of this study was to describe the 2016 Siak District education program planning. This research method uses a qualitative approach with the type of descriptive research

Based on the results of the study indicate that the planning of the related education program is the Department of Education and Culture in the field of elementary school development and the field of junior high school development with the Regional Development Planning Agency Head of Education and Inspectorate supervision. OPD related to the affairs of education is still not effective, the Office of Education and Culture through its fields implements only normative but does not involve technically in the practical process in the field with the education sector of the Regional Development Planning Agency and the lack of intensive coordination and communication between the Agency Regional Development Planning with OPD located in the Office of Education and Culture.

Keywords: *Communication, Coordination, Education Sector.*

Pendahuluan

Perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas, Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan. Dengan adanya perangkat daerah maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien dan efektif.¹

Sesuai dengan tugas dan fungsi dan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak Pasal 3 ayat 1 menyatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Siak diupayakan dengan optimal.

Strategi merupakan suatu langkah-langkah yang berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Siak yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Bupati Siak dalam upaya pelaksanaan di bidang pendidikan Kabupaten Siak yang merupakan penjabaran dari kurun waktu 2011-2016. Misi :*meningkatkan kualitas sumber daya manusia, beriman, dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.*²

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.³

Kelembagaan daerah bersinergi dengan baik akan menghasilkan keluaran baik dan terlaksana seluruh program yang direncanakan terutama bagi masing-masing instansi lembaga dengan satu tujuan yang sama. Untuk mencapainya memerlukan kerjasama dalam mengembangkan sektor pendidikan melalui penyelenggaraan program bidang pendidikan.

Kelembagaan merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan beberapa orang dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan kelembagaan itu memiliki tujuan dan memiliki sesuatu yang formal, ada administratif staf yang biasanya esksis dan bertanggung jawab serta adanya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan anggotanya.⁴

Dinas pendidikan Kabupaten Siak adanya yang mengatur pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar disebut dengan bidang pembinaan sekolah dasar (SD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar, dan pendidikan menengah disebut dengan bidang pembinaan sekolah menengah pertama (SMP) sesuai dengan tugas pokok fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

³ Arif, Mirrian Sojfyana. 2010, *Manajemen Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta.

⁴ Alfiandi Rahman, *Kelembagaan Kecamatan Dalam Koordinasi Bidang Kesehatan DI Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2016*, Skripsi Strata Satu Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, 2017.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

² Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

pembinaan sekolah menengah pertama (SMP).

Sedangkan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) adanya kepala subbidang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan. Domain kepala subbidang pendidikan di BAPPEDA mulai dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu mengoptimalkan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pengesahan untuk urusan pendidikan.

Pendidikan berperan sebagai faktor kunci dalam suatu keberhasilan daerah, karena pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.⁵

Pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan manusia atau sumber daya di masa sekarang terlebih lagi di masa yang akan datang. Hal ini di sebabkan karena dampak dari pendidikan sangat nyata dan dapat dirasakan langsung manfaatnya baik bagi individu masyarakat maupun bagi kebutuhan pemerintah. Karena dengan sumber daya manusia yang memadai maka segala program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan mudah.

Perencanaan program yang terkait dalam permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Siak masih belum terjalin efektif. Komunikasi antara bidang pembinaan SD dan bidang pembinaan SMP sebagai urusan pendidikan sendiri belum melakukan komunikasi intensif dengan lembaga badan perencanaan pembangunan daerah yaitu kepala subbidang pendidikan dalam

mengoptimalkan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pengesahan untuk urusan pendidikan.

Permasalahannya sampai saat ini adalah belum ada Peraturan daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendidikan daerah otonomi Kabupaten Siak, sehingga belum terwujud prinsip desentralisasi dalam tata kelola bidang pendidikan khususnya pada tataran lembaga pendidikan yang berdampak pada efektif dan efisiensi⁶.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian : Bagaimana Perencanaan Program Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Perencanaan program bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak tahun 2016.
2. Faktor yang mempengaruhi perencanaan program bidang pendidikan Kabupaten Siak tahun 2016.

Kerangka Teori Perencanaan

Menurut Siagian perencanaan adalah usaha sadar dan pengambilan

⁵ Pidarta, Made. 1988, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

⁶ Azizy, Qodry. 2007, *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Bandung.

keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁷

Sedangkan Bintoro perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengatakan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.⁸

Perencanaan meliputi :

- 1) Analisis, yaitu kupasan data dan proyeksi tentang masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini
- 2) Kebijakan, yaitu pemilihan rencana yang baik untuk pelaksanaan, yang meliputi pengetahuan mengenai maksud dan kriteria untuk menelaah beberapa alternatif rencana
- 3) Rancangan, yaitu rumusan dan sajian rencana karena memerlukan kupasan data, proses perencanaan harus didahului oleh pengumpulan data lewat telaah dan survei.

Komunikasi

Sofyandi dan Gurniwa pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu :

1. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh

memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.

2. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.⁹

Menurut Trenholm dan Jensen (1992) Komunikasi adalah proses dimana manusia secara kolektif menciptakan dan meregulasikan realitas sosial (*communication is the process whereby humans collectively create and regulate social reality*). Definisi tersebut menguraikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengertian komunikasi :

- a. Komunikasi sebagai proses (*communication as process*)
- b. Komunikasi sebagai ciri khas manusia yang unik (*communication as collective as uniquely human*)
- c. Komunikasi sebagai aktivitas kolektif (*communication as creative collective activity*)
- d. Komunikasi sebagai usaha kreatif (*communication as creative endeavor*)
- e. Komunikasi sebagai pengatur (*communication as regulatory*)¹⁰

Implikasi penggunaan di atas memunculkan beberapa hal penting. *Pertama*, melalui komunikasi masing-masing manusia saling menciptakan realitas, dengan kata lain realitas adalah produk komunikasi. *Kedua*, manusia memperkenalkan apa yang telah mereka ciptakan melalui komunikasi untuk mengontrol mereka. *Ketiga*,

⁷ Siagian, S P.1989, Administrasi Pembangunan, Ghalia Indonesia, hlm.50.

⁸ Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996, Perencanaan Pembangunan, Jakarta, Gunung Agung, hlm.12

⁹ Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. (2007). *Perilaku Organisasional*, Edisi pertama, cetakan pertama Yogyakarta: Graha Ilmu.

¹⁰ Yasir. (2011). *Teori Komunikasi*, Edisi Pertama, cetakan Pertama. Pekanbaru: CV. Witra Irzani.

komunikasi selalu terjadi dalam konteks budaya. *Keempat*, komunikasi membutuhkan kerjasama, maksudnya apa yang dilakukan orang ketika mereka bersama, bukan pada waktu mereka terpisah.

Koordinasi

Menurut Hasan (2005) komunikasi dalam menciptakan sinergi juga membutuhkan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi, bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi.

Moekijat (1994) koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Ada delapan syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

1. Hubungan langsung
Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
2. Kesempatan awal
Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
3. Dinamisme
Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
4. Tujuan yang jelas
Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
5. Organisasi yang sederhana
Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
6. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-

pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

7. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
8. Kepemimpinan supervisi yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.¹¹

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Alasan memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep judul dan perumusan masalah yang sudah dikemukakan pada latar belakang masalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang perencanaan program bidang pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Pembahasan Perencanaan Program Bidang Pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2016.

Perencanaan pendidikan sebagai suatu proses mempersiapkan

¹¹ Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju

seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang pendidikan secara menyeluruh. Mempersiapkan keputusan-keputusan atau alternatif kebijaksanaan untuk kegiatan masa depan dalam pembangunan pendidikan adalah merupakan fungsi dari perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan sebagai suatu strategi yang menghasilkan langkah-langkah untuk menuju titik tujuan dengan arah yang ditetapkan, sebenarnya mencakup tiga unsur pokok yang penting dan berlaku umum untuk semua jenis perencanaan yaitu keadaan sekarang (data dan informasi sebagai hasil potret atau situasi sekarang), keadaan yang diharapkan yang akan dituju dan dicapai (sasaran), dan strategi pencapaian sasaran (langkah-langkah usaha, taktik atau cara).¹²

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan Kabupaten Siak koordinasi antara dua lembaga daerah sangat memiliki peran yang sangat penting yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dalam menjalankan program dan kegiatan urusan pendidikan dilaksanakan 3 (SOTK) yang mendasar yakni, bidang perencanaan, bidang pembinaan SD, dan bidang pembinaan SMP. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan perencanaan

pembangunan dilaksanakan oleh Kasubbid bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pendidikan, dan merencanakan upaya dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan pendidikan.

Perencanaan pendidikan seharusnya dipandang sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan pendidikan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya.¹³ Karena itu perencanaan pendidikan sebagai unsur dan langkah pertama dalam fungsi pengelolaan pada umumnya menempati posisi yang amat penting dan amat menentukan .“perencanaan yang salah” karena suatu kegiatan tidak mencapai hasil yang optimal, walaupun kurang keberhasilan dapat juga disebabkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Perencanaan dapat membantu, akan tetapi perencanaan itu sendiri harus dipakai dalam suatu kombinasi yang harmonis dengan alat-alat lainnya seperti misalnya pelaksanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan. Perencanaan, untuk menjadi alat yang berguna, perlu juga didampingi dengan penegetahuan dan kemampuan bekerja seseorang secara efektif. Hal ini dianggap penting mengingat perencanaan bukan sebagai pengganti

¹² Enoch, Jusuf. 1995, *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.

¹³ Enoch, Jusuf. 1995, *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.

(substitusi) kewenangan seorang pengelola.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi pemerintah. Komunikasi dianggap sebagai jantung dari organisasi sehingga tanpa komunikasi tidak ada aktivitas organisasi dan ini berarti bahwa tanpa komunikasi maka organisasi akan mati. Agar komunikasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik (efektif dan tepat sasaran), maka pemerintah sebagai aktor utama yang menginisiasi komunikasi yang instensif.

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program pendidikan anak usia dini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Siak terkait pendidikan berkarakter dan inovasi sejak dini, kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran orangtua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini demi mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini. Sementara hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat menumbuh kembangkan anak secara menyeluruh baik dari sisi intelektual, psikis, dan keterampilannya sehingga dapat membentuk generasi yang berkarakter.

b. Program Pendidikan Dasar

Program pendidikan dasar merupakan lanjutan dari program pendidikan anak usia dini yang merupakan wujud dari program wajib belajar 9-12 tahun dengan pelaksanaan pendidikan ini sehingga tidak ada lagi anak-anak putus sekolah dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas sehingga masyarakat Kabupaten Siak dapat memiliki SDM yang cukup untuk dapat bersaing pada era yang lebih maju. Dari segi pendidikan pemerintah Kabupaten Siak telah menerapkan berbagai kebijakan

khususnya terkait dengan mutu pendidikan, namun ada beberapa kendala berarti dalam pelibatan proses pelaksanaan program kegiatan pendidikan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan merupakan bentuk proses atau sistem penyelenggaraan pendidikan pada sistem organisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan yang kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Pelayanan prima dapat diartikan sebagai suatu proses pelayanan dalam organisasi pemerintah yang dilakukan secara transparan untuk mencapai kepuasan sebagaimana visi yang telah ditetapkan dalam organisasi.

d. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Mutu tenaga pendidik berkaitan dengan baik buruknya suatu benda, kadar atau derajat. Tenaga kependidikan yang paling berperan dan sangat menentukan kualitas pendidikan yakni para guru dan kepala sekolah, mutu para pendidik yang diinginkan tidak terjadi begitu saja tetapi mutu pendidikan perlu direncanakan. Perencanaan program yang matang merupakan salah satu bagian dalam upaya meningkatkan mutu pendidik.

2. Koordinasi

Koordinasi merupakan usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan dalam mencapai tujuannya. Lebih jelasnya, koordinasi mengandung makna adanya keterpaduan integrasi dan keserasian serta kesimultanan sinkronasi seluruh tindakan yang dijalankan oleh

organisasi. Hal ini sesuai dengan prinsip; koordinasi, integrasi, dan sinkronasi.

a. Program pendidikan anak usia dini

Bidang pembinaan anak usia dini berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang berkoordinasi dengan Kabid bidang pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya untuk melaksanakan program pendidikan anak usia dini. Program Pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, di luar lingkungan bagi anak sebelum memasuki usia lembaga. Mengingat pembinaan dalam keluarga, pengertian dalam menstimulasikan anak, kurang dapat mendukung kebutuhan esensial dalam perkembangan anak.

b. Program Pendidikan Dasar

Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan nasional, pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah. Program pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau satuan pendidikan yang sederajat.

c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan dan mengupayakan penguatan manajemen

pelayanan pendidikan dan akuntabilitas untuk mencapai pelayanan publik dibidang pendidikan yang maksimal. Pelayanan publik yang prima bukan hanya *trend global* melainkan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses, mutu dan relevansi layanan pendidikan.

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan salah satu guna untuk mempersiapkan SDM agar bisa bersaing dengan daerah supaya berkompeten dan lebih maju, tenaga pendidik terus tersandung masalah yang sifatnya administratif, karena hal ini sangat mengganggu aktifitas tenaga pendidikan. Metode yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak di bidang pendidikan yaitu *good governance* yang transparan dan akuntabel. Penerapan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna untuk meraih peluang yang ada untuk mengembangkan karakter dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Siak.

Faktor Penghambat Perencanaan Program Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016.

Faktor Internal

Koordinasi Bidang Perencanaan Program Belum Efektif

Sumber daya manusia merupakan elemen yang terpenting dalam sebuah organisasi/instansi. Sebuah organisasi/instansi tidak dapat terlepas dari sumber daya manusia karena merupakan awal terbentuknya koordinasi yang efektif dan sebagai pilar utama sekaligus penggerak untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini

koordinasi bidang pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum efektif.

Faktor Eksternal

Kurang Efektif Komunikasi Antara OPD Bidang Pendidikan

Kurang efektif komunikasi yang terjalin antara Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan dengan Kasubbid bidang pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan mempengaruhi koordinasi dalam sebuah organisasi kelembagaan, hal ini berakibat juga mempengaruhi sinergi yang dibangun.

Kurangnya Koordinasi Bidang Pembinaan SD dengan Bidang Pembinaan Pendidikan

Koordinasi yang dibangun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kabid Pembinaan SD dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kasubbid bidang pendidikan kurang efektif. Hal ini hanya sebatas normatif misalnya penentuan rapat-rapat tetapi secara teknis Kasubbid bidang pendidikan tidak berperan aktif dalam proses praktek di lapangan. Seharusnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal ini sebagai penerima usulan-usulan perencanaan pendidikan ikut secara teknis dalam proses pelaksanaan di bidang pendidikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak, dalam sektor bidang pendidikan belum berjalan efektif. Sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum secara intensif dibangun baik upaya

yang dilakukan komunikasi dan koordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa (1) komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum berjalan optimal pada sektor bidang pendidikan sehingga upaya yang dilakukan dalam perencanaan program bidang pendidikan. (2) Beberapa hambatan dalam perencanaan program bidang pendidikan, hambatan-hambatan tersebut antara lain: (a) Pengawasan Pembinaan Administratif, (b) Sumber Daya Manusia, (c) Kurang Efektif Komunikasi Antara OPD bidang pendidikan, (d) Kurangnya Koordinasi Bidang Pembinaan SD dengan bidang pembinaan pendidikan.

Saran

1. Kelembagaan daerah khususnya yang terlibat kelembagaan daerah bidang pendidikan harus melakukan komunikasi, koordinasi, kerjasama yang intensif tidak hanya sebatas normatif tetapi perlu secara teknis dalam proses praktek di lapangan.
2. Untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan pembangunan sumber daya manusia (*Human Development Index-HDI*). Penempatan pegawai pada masing-masing dinas sesuai dengan kriteria/klasifikasi pegawai. Dalam rangka menunjang keberhasilan sistem pendidikan di tiap-tiap daerah dalam rangka memenuhi tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

Buku

- Arif, Mirrian Sojfyhan. 2010, *Manajemen Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta.

- Andy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Azizy, Qodry. 2007, *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Bandung.
- Enoch, Jusuf. 1995, *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2009, *Metode Ilmu Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, PT. Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta.
- Kaho, Riwo. 1990, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Mandar Maju, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Kybernologi Pemerintahan (Ilmu Pemerintahan 1)*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Pidarta, Made. 1988, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Semiawan, Cony. 1998, *Pendidikan Tinggi Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Soejito, Irawan. 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT. Rineka Cipta.
- Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*, Edisi pertama, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Utomo, Tjipto, Ruijter, kees. 1985, *Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan*, Gramedia, Jakarta.
- Yasir. 2011, *Teori Komunikasi*, Edisi Pertama, cetakan Pertama. CV. Witra Irzani. Pekanbaru.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupten Siak.
- Jurnal**
Abdul Muis, Madani Edisi 1 Mei 2012, Pentingnya Pendidikan di Era Otonomi Daerah Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia (SDM).
Fadhilah, Madani Edisi 1 Mei 2012, Pragmatisme Sebagai Konsep dan Sistem Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Praktek Pendidikan di Indonesia.
- Dokumen**
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2016-2021.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2016.
- Artikel**
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam <https://dprd.siakkab.go.id> di akses pada 1 januari 2018